BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Informasi merupakan salah satu kebutuhan yang mendasar bagi para *stakeholders* untuk mendapatkan informasi yang mereka butuhkan. Informasi yang akurat, lengkap, dan tepat waktu diharapkan dapat memudahkan para investor dalam mengambil keputusan investasinya. Perusahaan dituntut untuk memberikan informasi melalui laporan keuangan yang tidak hanya bersifat relevan, transparan dan akuntabel tetapi perusahaan dipaksa untuk memberikan informasi mengenai tata kelola perusahaan sejauh mana telah melaksanakan aktivitas sosialnya yang berhubungan dengan lingkungan dan masyarakat. Informasi yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial terhadap lingkungannya diwujudkan dalam bentuk *Corporate social responsibility* (CSR).

Perbankan syariah adalah salah satu lembaga syariah yang melaksanakan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Bank syariah merupakan badan usaha yang menghimpun dana dalam bentuk simpanan menggunakan hukum islam, yang mana telah berkembang dengan sangat pesat dalam waktu belakangan ini pada bidang perekonomian global. Menurut Wibowo (2015), pertumbuhan yang begitu cepat dan pesat serta signifikan ini dipengaruhi oleh berbagai aspek atau elemen diantaranya adalah aspek ekonomi, aspek politik, aspek sosial, aspek budaya, aspek geografis, dan aspek pertahanan keamanan. Yusuf (2010), pada pengungkapan program *Corporate Social Reporting* pada

perbankan syariah tidak hanya untuk memenuhi kewajiban yang telah diatur dalam undang – undang, namun program *Corporate Social Reporting* merupakan tindakan legitimasi perusahaan dalam melakukan operasi di suatu lingkungan serta untuk memperoleh keuntungan yang maksimal.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 dalam Bab II Pasal 4 ayat (2) tentang perbankan syariah telah dijelaskan mengenai pelaksanaan fungsi sosial BUS di Indonesia yang berisi :

BUS dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelolaan zakat.

Pertumbuhan Bank Umum Syariah di Indonesia yang berkembang pesat, menjadikan penelitian tentang CSR pada perbankan syariah sangat diperlukan. Hingga akhir tahun 2017 telah mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini dapat dilihat pada Statistik Perbankan Syariah (SPS) yang dipublikasikan oleh website OJK terdapat 13 Bank Umum Syariah (BUS) dan 21 Bank Umum Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah (UUS) dengan total KCP sebanyak 1315 unit yang tersebar di seluruh Indonesia. Kenaikan jumlah Bank Umum Syariah tersebut mengindikasikan bahwa publik percaya terhadap produk dan jasa yang disediakan oleh BUS. Oleh karena itu, sebagai wujud aspirasi atas kepercayaan masyarakat terhadap BUS tersebut harus diwujudkan dengan adanya bentuk laporan pengungkapan pada BUS sesuai dengan prinsip syariah.

Sudaryati dan Eskadewi (2012), Dalam Islam telah diatur tentang aturan komprehensif mengenai transparansi dan pertanggungjawaban perusahaan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari *social community*. Perusahaan

tidak hanya wajib untuk melakukan pertanggungjawaban kepada *shareholder* (pemegang saham), pemerintah, kreditor dan masyarakat tetapi juga harus melakukan kewajiban pertanggungjawabannya kepada Allah. Haniffa (2002), memberikan penjelasan tentang prespektif islam, bahwa sifat transparansi adalah pengungkapan yang mempunyai sifat wajib maupun sukarela dilakukannya salah satu amanah dari suatu organisasi. Prinsip-prinsip islami harus dilandaskan dalam pengungkapan pertanggung jawaban sosial karena merupakan salah satu bagian dari pengungkapan yang sukarela yang dilakukan oleh Bank Umum Syariah.

Haniffa (2002), memberikan pengungkapan bahwa alat ukur yang digunakan CSR *disclosure* pada Bank Umum Syariah masih menggunakan GRI atau *Global Reporting Initiative Index*. Pertanggungjawaban sosial dengan menyajikan informasi akuntansi sekarang ini telah berkembang adanya standar pengungkapan CSR untuk perbankan syariah dengan menderivasi dari prinsip-prinsip syariat islam yang telah disesuaikan dengan ketentuan dari *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution* (AAOIFI). Standar ini yang kemudian dinamakan dengan *Islamic Social Reporting* (ISR).

Haniffa (2002), adalah orang yang pertama kali meneliti tentang indeks ISR dalam penelitiannya dengan judul *Social Reporting Disclosure: An Islamic Perspective*. ISR kemudian dikembangkan secara lebih lanjut oleh Rohana Othman et al pada tahun 2009, dan ISR hingga saat ini akan terus dikembangkan oleh peneliti – peneliti generasi selanjutnya. Menurut Haniffa (2002), pengungkapan informasi penuh dalam laporan tahunan yang relevan dan handal akan membantu para pemangku kepentingan muslim dalam membantu mengambil

keputusan sosial, ekonomi, dan agama serta membantu manajemen perusahaan dalam memenuhi kewajiban kepada Allah SWT dan masyarakat yang disebut sebagai *Islamic Social Reporting*.

Fitria dan Hartanti (2010), menyatakan bahwa secara khusus indeks ISR merupakan perluasan dari *social reporting* yaitu meliputi harapan masyarakat yang tidak hanya mengenai peran perusahaan di dalam perekonomian, tetapi juga peran perusahaan dalam perspektif islam. Terlebih lagi, indeks ISR juga menitikberatkan pada keadilan sosial yang berisi mengenai pelaporan lingkungan, hak minoritas dan karyawan. Indeks ISR akan dikelompokkan menjadi enam tema yaitu *Finance and Investment Theme, Product and Service Theme, Employee Theme, Society Theme, Environment Theme, dan Corporate Governance Theme*.

Perkembangan ISR di Indonesia tergolong masih sangat lambat jika dibandingkan dengan negara – negara Islam lainnya. Hal ini disebabkan oleh pengungkapan ISR yang masih bersifat sukarela (*voluntary*) pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Keadaan tersebut ditambah dengan belum adanya peraturan khusus yang menjelaskan dan mengatur tentang item-item pengungkapan indeks ISR. Penelitian mengenai pengungkapan CSR pada perbankan syariah dengan menggunakan indeks ISR masih terbatas. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan ISR pada BUS di Indonesia.

Teori yang mendasari pengungkapan ISR adalah *Shari'ah Enterprise Theory* (SET) yang menjelaskan bahwa Allah adalah pusat dari segala sesuatu. Dalam hal ini, *Islamic Social Reporting* merupakan amanah serta perwujudan

akuntabilitas sebagai makhluk Allah yang tidak lepas dari tujuan syariat islam. *Shari'ah Enterprise Theory* memiliki nilai yang secara adil, benar, jujur, amanah, dan serta tanggung jawab seseorang hanya kepada Allah SWT. Triyuwono (2007) mengatakan bahwa manusia sebagai *khalifatullah fil ardh* harus patuh terhadap hukum-hukum Allah. Penerapan SET pada Bank Umum Syariah dalam melaksanakan tujuannya tidak hanya bertanggung jawab kepada pemilik dan *stakeholders* namun juga kepada Allah.

Pengungkapan ISR merupakan hal yang penting bagi bank umum syariah yang mana harus sesuai dengan ekspektasi dari para pemangku kepentingan terpenuhi, utamanya bagi masyarakat umat islam. Penelitian ini akan mempunyai hasil yang berbeda dari beberapa penelitian yang satu dengan yang lainnya, dalam hal ini variabel yang digunakan yaitu *Islamic Governance Score* dan kepatuhan syariah. Faktor lain yang mempengaruhi pengungkapan ISR pada penelitian ini diantaranya ukuran perusahaan, profitabilitas dan *leverage*, berikut ini akan dijelaskan mengenai variabel-variabel dan hasil yang berbeda dari beberapa penelitian terdahulu.

Ada berbagai faktor kuat yang diduga turut mempengaruhi pengungkapan ISR pada perbankan syariah, salah satunya dari segi *Islamic Corporate Governance*. Penggunaan *Islamic governance* sebagai variabel tidak bisa diukur secara langsung melainkan menggunakan proksi *Islamic Governance Score* (Skor-IG). *Islamic Governance Score* adalah proksi dari berbagai karakteristik dewan pengawas syariah. Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan institusi pengawasan internal perbankan syariah di Indonesia. Dewan Pengawas Syariah

memegang peran yang penting dalam proses pengawasan pada perbankan syariah. Sesuai dengan teori *enterprise syariah, stakeholder* kedua dari teori ini adalah *direct-stakeholder* yaitu pihak yang secara langsung memberikan kontribusi pada entitas, baik dalam bentuk kontribusi finansial maupun non finansial. DPS memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memberikan kontribusi memberikan masukan dan memberi peringatan kepada pihak manajemen BUS tentang pengelolaan dan kebijakan manajemen yang berkaitan dengan kepatuhan syariah. Karim (1995) dalam Farook dan Lanis (2005), menggambarkan bahwa kewenangan Dewan Pengawas Syariah sama dengan kewenangan auditor eksternal. Oleh karena itu, Dewan Pengawas Syariah diduga turut mempengaruhi kebijakan manajemen termasuk dalam hal pengungkapan CSR.

Farook dan Lanies (2005), memberikan laporan berupa laporan tanggung jawab sosial pada bank syariah yang dipengaruhi adanya beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut adalah populasi penduduk muslim, *Islamic Governance Score* (IGS), tekanan politik suatu negara, dan keadaan sosial serta struktur kepemilikan dengan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol. Sampel penelitian tersebut sebanyak 47 bank syariah yang diambil dari 14 negara di dunia. Hasil penelitian tersebut membuktikan bahwa tekanan politik suatu negara dan keadaan sosial, jumlah populasi muslim, *Islamic Governance Score*, dan struktur kepemilikan mempengaruhi pengungkapan pelaporan tanggung jawab sosial dengan hasil yang signifikan.

Menurut Kasih (2017), dalam penelitiannya dengan judul Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan *Islamic Social Reporting* mengungkapkan

bahwa *Islamic Governance Score* yang terdiri atas proksi jumlah DPS, latar belakang pendidikan, dan reputasi dari DPS berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan ISR pada 19 Bank Syariah yang ada di Indonesia, Malaysia dan Negara *Gulf Corporate Council*. Berbeda dengan penelitian Rosiana dkk (2015) dan Nabilah dkk (2018) *Islamic Governance Score* dengan proksi keberadaan DPS , jumlah DPS , banyaknya rapat, *cross membership*, latar belakang pendidikan dan pengalaman atau reputasi menunjukkan tidak memiliki pengaruh terhadap *Islamic Social Reporting* yang berada bank umum syariah di seluruh Indonesia.

Kepatuhan syariah merupakan variabel baru dalam penelitian ini. Kepatuhan syariah dalam penelitian ini berdasarkan pada Peraturan Bank Indonesia No. 9/19/PBI/2007 dan No. 10/16/PBI/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah. Jika nilai *self assessment* pelaksanaan *Good Corporate Governance* untuk indikator Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa dalam Perbankan Syariah memperoleh peringkat baik atau nilai yang kecil yang berarti bahwa bank syariah telah memenuhi aspek kepatuhan syariah sehingga kemampuan perusahaan untuk mengungkapkan laporan pertanggungjawaban sosial Islami akan lebih tinggi (Khasanah, 2015). Hasil ini memberikan penemuan baru dalam penelitian Khasanah (2015) tentang *Islamic Social Reporting*, dimana tingkat pengungkapan ISR juga turut dipengaruhi oleh kepatuhan bank syariah terhadap prinsip-prinsip

syariah. Hasil lain dari penelitian Marharani (2016) mengungkapkan bahwa kepatuhan syariah tidak memberikan pengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada bank syariah di Indonesia.

Penelitian ini merupakan replikasi jurnal utama dari penelitian Rosiana dkk (2015) yang menggunakan variabel ukuran perusahaan, profitabilitas, *leverage*, dan *Islamic Governance Score*. Periode penelitian tahun 2010-2012 dengan populasi 11 BUS yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan sampel sebanyak 30 BUS. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu: (1) penambahan variabel penelitian, pada penelitian ini menambahkan kepatuhan syariah, bank syariah yang melakukan kegiatannya berdasarkan pada aturan syariah akan melakukan pengungkapan ISR yang baik sesuai dengan prinsip syariah (Marharani, 2016). (2) Penelitian Rosiana dkk (2015) variabel *Islamic Governance Score* menggunakan empat proksi Dewan Pengawas Syariah, yaitu jumlah, *cross membership*, latar belakang pendidikan dan reputasi dewan pengawas syariah sedangkan penelitian ini menambah dua proksi DPS yaitu keberadaan DPS dan jumlah rapat DPS. Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan menyebutkan bahwa Dewan Pengawas Syariah merupakan bagian dari organ perusahaan yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan Perusahaan agar sesuai dengan Prinsip Syariah, serta dalam pasal 40 menjelaskan bahwa Dewan pengawas Syariah wajib menyelenggarakan rapat DPS secara berkala paling sedikit 6 (enam) kali dalam 1 (satu) tahun (Nabilah dkk, 2018). (3) Penelitian Rosiana dkk (2015)

variabel ukuran perusahaan, profitabilitas, dan *leverage* sebagai variabel independen, dalam penelitian ini ketiga variabel tersebut sebagai variabel kontrol (4) Tahun pengamatan, Rosiana dkk (2015) tahun pengamatan pada periode 2010-2012, sedangkan penelitian ini menggunakan periode 2014-2016. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **PENGARUH *ISLAMIC GOVERNANCE SCORE* DAN KEPATUHAN SYARIAH TERHADAP PENGUNGKAPAN *ISLAMIC SOCIAL REPORTING* PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA.**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan pada penelitian ini adalah:

1. Sejauh mana pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) pada perbankan syariah di Indonesia?
2. Apakah *Islamic Governance Score* berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) perbankan syariah di Indonesia periode 2014-2016?
3. Apakah kepatuhan syariah berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) perbankan syariah di Indonesia periode 2014-2016?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menguji secara empiris :

1. Untuk menganalisis sejauh mana pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) pada perbankan syariah di Indonesia.
2. Pengaruh positif *Islamic Corporate Governance* terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) perbankan syariah di Indonesia.
3. Pengaruh positif kepatuhan syariah terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) perbankan syariah di Indonesia.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi ini :

1. Manfaat Teoritis

Memberikan kontribusi dalam pengembangan akuntansi mengenai *bagaimana Islamic Governance Score* dan kepatuhan syariah dapat mempengaruhi pengungkapan *Islamic Social Reporting* dalam laporan tahunan perbankan syariah yang ada di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi perbankan syariah, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan masukan serta sebagai penambah informasi bagi perbankan syariah yang ada di Indonesia dalam menerapkan regulasi tentang penerapan *Islamic Corporate Governance* khususnya pengungkapan dengan indeks *Islamic Social Reporting*.

- b. Bagi perbankan syariah, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam membuat *Islamic Social Reporting* yang memadai dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
- c. Bagi calon investor dan kreditor, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi maupun keputusan dalam memberikan kredit.
- d. Bagi akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan bagi rekan-rekan untuk dapat dijadikan referensi dan dapat dikembangkan dan diperbaiki nantinya.